

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertanian merupakan sektor penting pada negara agraris yang sedang berkembang, terutama bagi negara-negara dengan penduduknya yang mengandalkan sektor pertanian, seperti Indonesia. Sektor pertanian berguna untuk memperbaiki mutu makanan bagi penduduknya sekaligus pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Pembangunan di bidang pertanian harus memperhatikan beberapa komponen yang sangat fungsional, hal ini dikarenakan pertanian di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh masyarakat di pedesaan yang masih menggunakan cara-cara tradisional, dengan tingkat pendidikan formal petani yang relatif masih rendah (Ashari, 2019).

Selain permasalahan pada pengetahuan petani dalam pengelolaan pertanian secara modern dan profesional, permasalahan yang tak kalah pentingnya bagi petani di Indonesia adalah permasalahan pada tingginya harga pupuk, dan juga seringkali menjadi problema dengan kelangkaan pupuk. Permasalahan ini selalu menjadi problema bagi petani di Indonesia sejak lama, walaupun Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait pupuk, namun belum juga kebijakan yang dibuat berjalan dengan efektif, terbukti masih adanya permasalahan tersebut.

Pupuk merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pertanian. Pupuk menjadi penting karena dengan pupuk maka tanaman-tanaman pertanian seperti padi, jagung, kopi, dan hortikultura dapat tumbuh dengan baik. Sebagai salah satu aspek penting, pupuk justru sulit didapatkan oleh para petani karena harga pupuk yang dijual terbilang mahal dan mengakibatkan tingginya biaya pertanian.

Sebagai tindak lanjut penanganan masalah tingginya harga dan kelangkaan pupuk, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan yang tergolong baru, yaitu Program Kartu Tani untuk mengelola penyaluran pupuk bersubsidi yang telah dimulai sejak tahun 2015, namun hingga saat ini kebijakan inipun belum sepenuhnya berjalan lancar. Beberapa masalah muncul ketika petani maupun Kios Pupuk Lengkap (KPL) diminta untuk menerapkan Kartu Tani dan mesin *Electronic*

*Data Capture* (EDC) sebagai media transaksi, dan pengiriman pupuk yang seringkali terlambat. Beberapa masalah tersebut antara lain terkait minimnya pemahaman petani dan KPL terhadap Program Kartu Tani, kendala penggunaan kartu berbasis *chip* (Kartu Tani), dan keterbatasan kemampuan keuangan petani. Selain itu, petani juga merasa khawatir kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, jika harus mengandalkan kebijakan baru tersebut.

Kebijakan subsidi pupuk menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan petani, terutama bagi petani kecil. Program pupuk bersubsidi yang diluncurkan pemerintah ditujukan bagi petani skala kecil, selayaknya petani akan termotivasi dengan adanya program Kartu Tani untuk dapat meningkatkan produksinya yang berdampak pada bertambahnya pendapatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bagi petani.

Pentingnya penggunaan pupuk bagi petani telah mengakibatkan munculnya berbagai dinamika dalam distribusi dan pemanfaatannya. Program kartu tani diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi/bantuan ini. Kartu tani dirancang secara khusus untuk untuk petani kecil yang implementasinya dimulai di Pulau Jawa. Perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) memegang peran yang penting dalam pelaksanaannya di lapangan.

Kartu tani yang digunakan di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya adalah kartu debit BRI *co-branding* yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan pembayaran pupuk bersubsidi serta dapat berfungsi untuk melakukan transaksi perbankan pada umumnya. Pemantauan alokasi dan transaksi pembayaran dilakukan di mesin *Electronic Data Capture* (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer yang terdapat di setiap desa. Kartu tani bertujuan untuk mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan memenuhi asas 6 tepat, yakni tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga. Pengalokasian jumlah pupuk bersubsidi dalam program kartu tani didasarkan pada rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) pupuk bersubsidi yang disusun di tiap kelompok tani dengan didampingi oleh penyuluh pertanian.

Permasalahan pada distribusi pupuk adalah sistem yang diterapkan saat ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan seringnya terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi, terlambatnya distribusi pupuk bersubsidi, dan subsidi yang tidak tepat sasaran. Dampaknya adalah harga pupuk di tingkat pengecer tidak sepenuhnya mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan, dan mengakibatkan pemupukan tidak berjalan optimal. Selain itu kurangnya motivasi petani untuk dapat mempelajari spesifikasi jenis pupuk dan cara penggunaannya.

Pada praktiknya, penyaluran pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan masih seringkali mengalami berbagai permasalahan. Rachman dalam Ashari (2019), menyampaikan bahwa permasalahan utama kinerja penyaluran pupuk bersubsidi adalah pada sisi perencanaan, distribusi, sampai dengan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan baik dari sisi penyusunan kebijakan untuk perencanaan kebutuhan pupuk, manajemen pengelolaan distribusi pupuk, sampai dengan pengawasan agar memenuhi kriteria 6 tepat, sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Penetapan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yaitu tepat waktu, tepat harga, tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat tempat.

Proses penyaluran pupuk bersubsidi melalui Program Kartu Tani yang akan diteliti adalah pada saat proses distribusi antara agen lini IV (tingkat kecamatan) dengan petani. Pada proses ini, Kartu Tani digunakan sebagai media transaksi dan agen pupuk dalam hal ini KPL diwajibkan menyediakan mesin EDC sebagai media penerimaan transaksi. Pada dasarnya pemerintah mengeluarkan kebijakan program Kartu Tani adalah untuk pengadaan pupuk, sehingga dapat meningkatkan hasil produksinya yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani.

Wilayah Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya dengan ketinggian 320 mdpl, luas wilayah 1.153 Ha, yang terdiri dari persawahan 499 Ha dan sisanya merupakan daratan bukan sawah. Adapun jumlah petani di kecamatan Purbaratu tersebar di seluruh wilayah kelurahan dengan data sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Pengguna Kartu Tani di Kecamatan Purbaratu Tahun 2022**

No	Kelurahan	Jumlah Petani	Pengguna Kartu Tani	%
1	Sukanagara	315	201	64
2	Sukamenak	342	204	60
3	Sukaasih	169	102	60
4	Purbaratu	496	343	69
5	Sukajaya	423	312	74
6	Singkup	456	312	68
<b>Jumlah</b>		<b>2.201</b>	<b>1.474</b>	<b>66</b>

Sumber: Ketua Gapoktan Kecamatan Purbaratu. 2022

Tabel 1 menunjukkan petani di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya yang memperoleh Kartu Tani baru mencapai 66%, belum seluruhnya petani yang sudah memiliki Kartu Tani menggunakan Kartu Tani tersebut, hal ini dikarenakan keengganan petani menabung di bank sebagai saldo untuk pembelian pupuk bersubsidi, selain itu masih terdapat beberapa pengusaha pupuk yang menjual pupuk dengan cara pinjaman, yang akan dibayar oleh petani pada saat panen tiba, hal ini sudah tentu harganya melebihi harga pasaran (Gapoktan Kecamatan Purbaratu, 2022).

Kartu tani adalah program yang relatif baru sehingga masih perlu untuk dikembangkan dan disempurnakan untuk implementasi yang lebih efektif lagi. Penelitian-penelitian terkait kartu tani diperlukan sebagai dasar informasi dalam mengembangkan program tersebut. Program Kartu Tani di Kecamatan Purbaratu yang baru dimulai tahun 2019 belum efektif, sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan petani (Gapoktan Kecamatan Purbaratu, 2022), hal ini jika dilihat dari beberapa gejala berikut: Produksi padi di kecamatan Purbaratu menurun, dimana dengan luas lahan persawahan 499 ha pada tahun 2020 hasil produksi padi 8308 ton, sedangkan pada tahun 2021 dengan luas lahan yang sama, produksi padi hanya mencapai 6434 ton.

1. Petani di Kecamatan Purbaratu masih menggunakan pupuk yang dibeli secara pinjaman, dan akan dibayar pada saat panen, dan sudah tentu dengan harga yang tinggi, sehingga setelah panen penghasilannya berkurang.

2. Masih terdapat petani yang belum mementingkan kesehatannya, dimana masih adanya petani yang belum terdaftar sebagai anggota BPJS.
3. Masih terdapat petani yang belum mementingkan tingkat pendidikan untuk anaknya, sebagian besar hanya menyekolahkan anaknya sampai tingkat SMP/SMA hal ini dikarenakan tingginya biaya untuk pendidikan.

Implementasi kebijakan kartu tani belum dapat meningkatkan pendapatan atau penghasilan petani secara signifikan, hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa indikator pada implementasi program kartu tani yang belum berjalan dengan baik, antara lain:

1. Pengetahuan petani terhadap jenis pupuk yang digunakan, sehingga seringkali terjadi kesalahan dalam pemupukan, yang pada akhirnya berdampak pada hasil panennya yang kurang maksimal, bahkan terjadi gangguan pada padi yang dihasilkan, dikarenakan kelebihan atau kekurangan dalam pemberian pupuk. Oleh karena itu dalam pengembangan program Kartu Tani harus diikuti dengan program penyuluhan.
2. Program kartu tani dapat dikatakan belum tepat sasaran, hal ini dilihat dimana data petani yang memperoleh Kartu Tani tidak Valid, dimana seharusnya Kartu Tani diberikan kepada petani yang memiliki luas lahan persawahan kurang dari 2 hektare, namun pada kenyataannya terdapat petani yang memiliki lahan persawahan lebih dari 2 hektare mendapatkan Kartu Tani. Selain itu adapula masyarakat yang bukan petani memperoleh Kartu Tani, sehingga dia menjualnya lagi kepada petani dngan harga yang lebih tinggi.
3. Beberapa kali terjadi keterlambatan distribusi pupuk hingga ke KPL, hal ini dapat menghambat proses pembenihan bagi petani, dan meningkatnya harga jual pupuk di toko lain, dikarenakan kelangkaan pupuk.
4. Penyuluh pertanian masih kurang dalam memberikan penyuluhan terkait pengetahuan petani dalam pengelolaan lahan persawahan berdasarkan penggunaan pupuk tertentu, maupun cara penyimpanannya, contohnya penyimpanan jenis pupuk urea, sifatnya higroskopis, sehingga mudah larut dan mudah diserap tanaman. Reaksinya sedikit asam dan mudah terbakar oleh sinar matahari sebaiknya simpan dalam suhu ruangan yang tidak terlalu panas maupun

lembab, demi menjaga kualitas pupuk urea. Adapun jenis pupuk ZA yang hanya digunakan pada tanaman agar terhindar dari hama.

5. Penyuluh pertanian masih kurang dalam pemberian motivasi dan pembinaan secara langsung di lapangan, seringkali penyuluhan hanya dilakukan secara teoritis di bale desa.

Berkenaan dengan fenomena dan permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi program Kartu Tani tersebut. Adapun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, berjudul: “Pengaruh Implementasi Program Kartu Tani terhadap Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Sawah di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program kartu tani di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana motivasi kerja petani setelah adanya program kartu tani di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya?
3. Bagaimana kesejahteraan petani padi sawah di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya setelah adanya program kartu tani?
4. Bagaimana pengaruh implementasi program kartu tani dan motivasi kerja petani padi sawah terhadap kesejahteraan petani padi sawah di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya secara parsial maupun simultan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Implementasi program kartu tani di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.
2. Motivasi kerja petani setelah adanya program kartu tani di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya.

3. Kesejahteraan petani padi sawah di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya setelah adanya program kartu tani.
4. Bagaimana pengaruh implementasi program kartu tani dan motivasi kerja petani padi sawah terhadap kesejahteraan petani padi sawah di Kecamatan Purbaratu Kota Tasikmalaya secara parsial maupun simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberi manfaat ganda, baik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan (kegunaan teoritis), maupun bagi praktek-praktek ilmu gribisnis (kegunaan praktis). Tujuan penelitian ini khususnya adalah bagi pengembangan ilmu Agribisnis. Adapun kegunaan yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Agribisnis terkait implementasi dan tingkat kesejahteraan petani.
2. Secara praktis (guna laksana), penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang menghasilkan implementasi program kartu tani.